



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : LOKA POM BELITUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASRUDDIN**
2. Jabatan : **KEPALA LOKA**
3. NHK : **797670**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.320.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/180 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/60 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA MANOKWARI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 1.325 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA LUWU, Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 198.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 1.5 METIK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MANUAL Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, HONDA AVANZA 1.5 VELOZ M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



4. MOTOR, VARIO 1.5 VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	710.457.760
F. HARTA LAINNYA	Rp.	845.000.000
Sub Total	Rp.	4.112.957.760
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.112.957.760

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.